

Panduan Pajak Pertambangan & Mineral

PRIORITAS SULAWESI

Emas • Nikel • Perak • Tembaga • Mineral lainnya

Mulai dari pembukuan, kenali produk, pahami alur pajaknya.
Untuk pengusaha, admin pajak, dan pembaca awam.



PPh • PPN • Royalti/PNBP • Pajak daerah • Ekspor • DHE SDA
Pembukuan • Standar akuntansi • Alur bisnis • Contoh pajak

EDISI SEPTEMBER 2026

Penelaahan sumber per 16 September 2026

Ilustrasi AI berlatar pertambangan tropis; bukan lokasi tambang tertentu.

Dari buku usaha ke kewajiban pajak

Ikuti urutan ini untuk memahami hubungan kegiatan tambang, laporan keuangan, dan kewajiban pajaknya.

Bagian	Isi utama	Halaman
01 / Fondasi	Pencatatan, pembukuan, dokumentasi, dan sistem kerja	3-5
02 / Akuntansi	SAK EP, PSAK 118, serta akun penting tambang	6-8
03 / Komoditas	Emas, nikel, perak, tembaga, mineral lain, dan istilah	9-11
04 / Proses bisnis	Bagan per tahap dan label pajak setiap alur	12-17
05 / Dasar pajak	Peran usaha, PPh badan, biaya, PPN, PPh 22	18-25
06 / Modul komoditas	Nikel, royalti, emas, bea keluar, batuan, daerah	26-32
07 / Transaksi lanjutan	Jasa, kemitraan, ekspor, dan pembanding batu bara	33-36
08 / Kerja bulanan	Rekonsiliasi, kalender, rencana 30 hari, lembar keputusan	37-40
Rujukan	Istilah, sumber resmi/teknis, dan batas penerapan	41-47

Cara membaca label pada bagan

PPh = Pajak Penghasilan. PPN = Pajak Pertambahan Nilai. Label menandai kewajiban yang perlu diperiksa; syarat objek, pelaku, dan transaksi tetap menentukan. Royalti/PNBP dan DHE ditulis terpisah karena berbeda dari pajak.

Pembaca utama: pengusaha, direktur, admin pajak, dan pembukuan. Contoh angka bersifat ilustratif. Gunakan penanda isi PDF untuk menuju bab. Tautan sumber dapat diklik; tanggal penelaahan sumber edisi ini: 16 September 2026.

Buku yang rapi melindungi usaha

Mulai dari bukti kegiatan dan transaksi. Angka pajak baru dapat dihitung dengan baik setelah datanya tersambung.

Istilah	Bahasa sehari-hari
Pencatatan kegiatan	Merekam tonase, kadar, keluar-masuk barang, tagihan, dan pembayaran setiap hari. Ini bahan baku pembukuan.
Pembukuan	Mengolah transaksi menjadi catatan aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya, lalu laporan keuangan.
Dokumentasi	Menyimpan bukti dan penjelasan yang membuat catatan dapat ditelusuri kembali.

Perusahaan berbentuk badan wajib membukukan

PT, CV, dan badan lainnya di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan sederhana sebagai pengganti pembukuan hanya tersedia bagi orang pribadi yang memenuhi ketentuan; bukan pilihan bebas bagi badan. Dasar: Pasal 28 ayat (1)-(2) UU KUP.

Mengapa pemilik usaha perlu peduli?

Tahu laba: kas masuk dapat berupa pinjaman atau uang muka, bukan penjualan. **Menjaga aset:** selisih stok dan tagihan segera terlihat. **Meyakinkan bank/investor:** angka dapat diuji. **Menjelaskan pajak:** biaya, kredit pajak, dan fasilitas punya bukti pendukung.

Buku disusun dengan itikad baik, konsisten, dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Bahasa Indonesia dan Rupiah menjadi titik awal; penggunaan bahasa/mata uang lain mengikuti ketentuan izin. Pembukuan tidak boleh hanya dibuat saat SPT akan dilaporkan.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

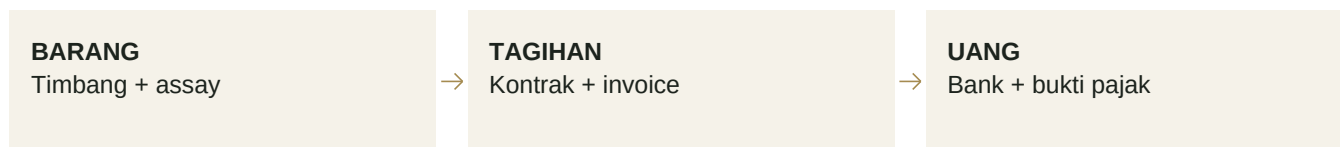
DARI LAPANGAN KE PAJAK

Bukti membuat angka dapat dijelaskan

Tonase, nilai tagihan, dan kas saling terhubung dalam pembukuan.

Satu pengiriman, satu berkas

Nomor lot atau batch menjadi penghubung antara petugas lapangan, admin, bagian pajak, dan pemilik usaha.



Berkas	Mengapa disimpan?
Izin, RKAB, kontrak, identitas mitra	Membuktikan hak berusaha, asal produk, pihak penjual, dan tanggung jawab masing-masing.
Tiket timbang, hasil uji, stok, serah terima	Menjelaskan berapa yang diproduksi/dijual, kualitasnya, dan kapan barang diterima.
Invoice, faktur pajak, bukti potong/pungut	Menghubungkan nilai transaksi dengan kewajiban dan kredit pajak.
Rekening koran, bukti transfer, billing	Membuktikan penyelesaian pembayaran; tetap perlu dokumen yang menjelaskan tujuan transaksi.
Memo koreksi dan persetujuan	Menjelaskan perubahan kadar, harga, volume, jurnal, atau perlakuan pajak.

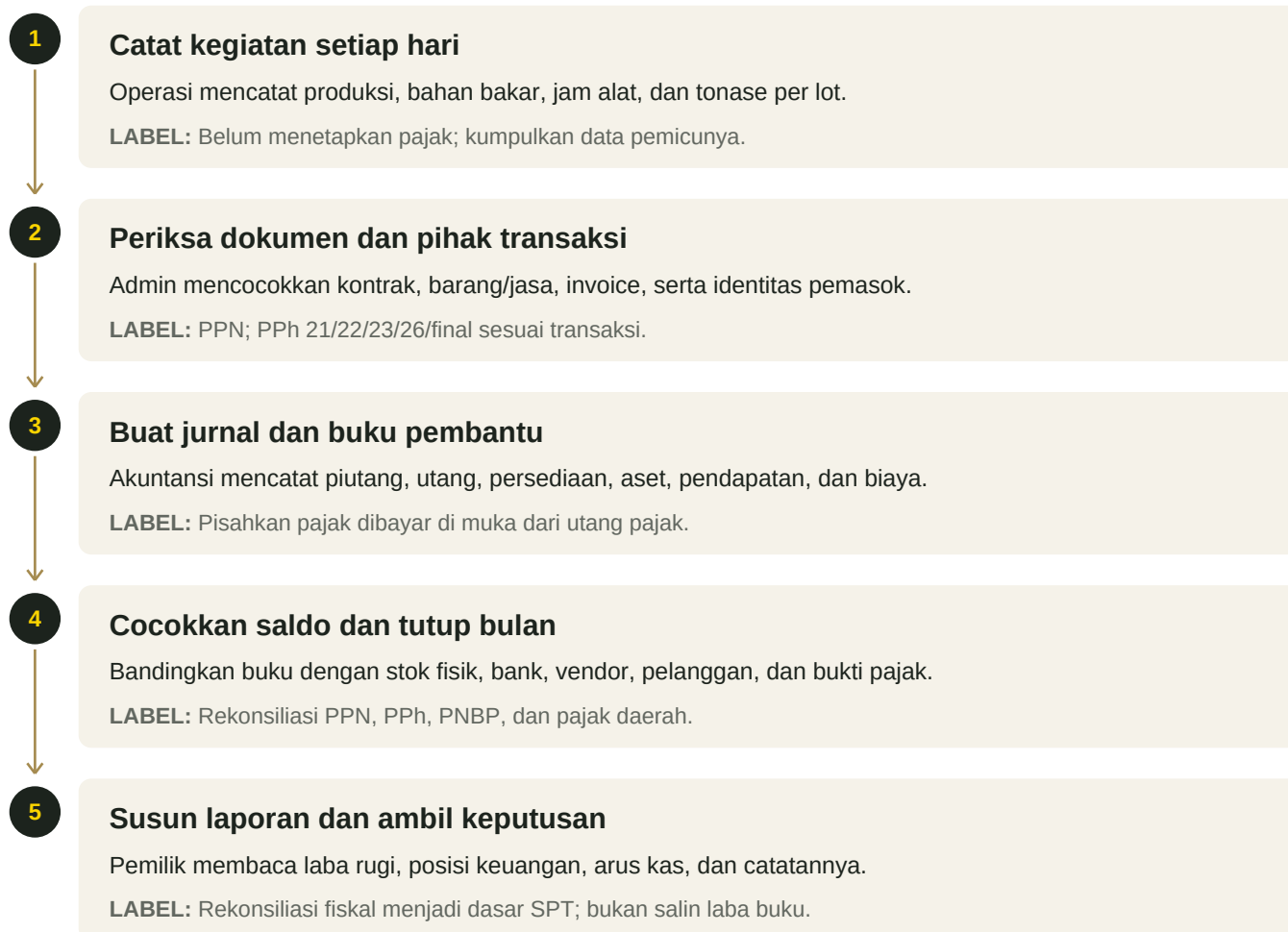
Simpan 10 tahun di Indonesia

Pasal 28 ayat (11) UU KUP mencakup buku, catatan, dokumen dasar, dan hasil pengolahan data elektronik. Penggunaan aplikasi daring tidak menghapus kewajiban penyimpanan. Tetapkan pengelola arsip, hak akses, cadangan data, serta kemampuan mengambil kembali dokumen.

Contoh nama berkas: 2026-09_LOT-015_Invoice-042. Simpan dokumen asli bila diperlukan, versi final, dan riwayat koreksi. Masa simpan pajak 10 tahun tidak otomatis membolehkan pemusnahan dokumen yang masih diperlukan untuk kontrak atau sengketa.

Dari catatan menjadi laporan

Sistem akuntansi adalah gabungan orang, bukti, prosedur, akun, dan aplikasi. Membeli software saja belum menyelesaikannya.



Pembagian tugas minimum: pembuat transaksi, pemberi persetujuan, dan pengecek sebaiknya berbeda. Jika tim kecil, pemilik menelaah bukti serta rekonsiliasi setiap bulan. Ini rancangan pengendalian, bukan format software yang diwajibkan.

Pilih kerangka yang sesuai

Istilah yang tepat adalah SAK Entitas Privat (SAK EP). PSAK 118 adalah satu standar di dalam SAK Indonesia.

Pertanyaan awal

Apakah perusahaan memiliki akuntabilitas publik, wajib mengikuti kerangka tertentu oleh regulator, atau harus memenuhi kebutuhan pelaporan kelompok usaha? Putuskan berdasarkan status dan kewajiban pelaporannya, bukan besar omzet saja.

SAK ENTITAS PRIVAT

Untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menyusun laporan tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pengecualian bagi entitas berakuntabilitas publik memerlukan izin regulasi otoritas.

Berlaku sejak **1 Januari 2025**, menggantikan SAK ETAP.

SAK INDONESIA

Gunakan jika diwajibkan atau dipilih sesuai ketentuan. Terapkan standar yang relevan untuk persediaan, aset, pendapatan, eksplorasi, dan kewajiban.

PSAK 118 menggantikan PSAK 201 mulai **1 Januari 2027** untuk penyajian dan pengungkapan.

Jangan mencampurkan kerangka sesuka hati

Pemakai SAK EP mengikuti kerangka SAK EP; tidak otomatis harus menambahkan PSAK 118 pada 2027. Pemakai SAK Indonesia tidak cukup menerapkan PSAK 118 saja. Jika ada kebutuhan beralih kerangka, susun analisis kelayakan dan ketentuan transisinya.

SAK EMKM merupakan kerangka lain yang hanya dipakai jika kriteria dan kebutuhan pelaporan sesuai. Panduan ini memusatkan pembahasan pada SAK EP dan SAK Indonesia untuk usaha tambang.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Standar dipilih sebelum laporan disusun

Catat alasan pemilihan kerangka dan terapkan secara konsisten.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

Apa yang berubah oleh PSAK 118?

Untuk perusahaan pemakai SAK Indonesia, persiapkan pemetaan laporan sejak 2026.

OPERASI

Kegiatan utama

INVESTASI

Pos yang relevan

PENDANAAN

Pos yang relevan

PSAK 118 mengatur pengelompokan penghasilan dan beban, subtotal tertentu, serta pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen. Kategori pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan juga diatur. PSAK ini bukan aturan tarif pajak.

Ilustrasi ringkas laporan laba rugi

Susunan sederhana perusahaan tambang	Rp juta
Pendapatan	1.000
Beban operasi (termasuk harga pokok)	(700)
Laba operasi	300
Hasil investasi yang memenuhi kategori investasi	20
Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan	320
Beban pendanaan	(40)
Laba sebelum pajak	280
Beban pajak penghasilan	(60)
Laba tahun berjalan	220

Angka dan klasifikasi di atas adalah ilustrasi, tanpa operasi yang dihentikan. Beban pajak Rp60 juta merupakan asumsi, bukan penerapan tarif tertentu. Klasifikasi nyata bergantung pada fakta dan ketentuan standar.

Pekerjaan admin dan akuntansi sekarang

Simpan rincian akun dan transaksi 2026; petakan ke format baru; siapkan data komparatif sesuai ketentuan transisi; serta dokumentasikan ukuran kinerja yang digunakan manajemen. Pilih dan menyetujui kebijakan dan tim akuntansi menelaah penyajiannya.

Akun harus mengikuti kegiatan

Di awal proyek, sepakati cara mencatat pengeluaran sebelum jumlah transaksinya membesar.

Kegiatan / saldo	Apa yang perlu dipisahkan?
Eksplorasi dan evaluasi	Pisahkan per wilayah/proyek dan tahap. Uji syarat pengakuan sebagai aset menurut kerangka yang dipilih; tidak semua biaya boleh dikapitalisasi.
Pengembangan dan alat produksi	Bedakan bangunan, alat berat, hak/aset takberwujud, serta biaya operasi. Catat masa manfaat, penyusutan/amortisasi, dan penurunan nilai.
Produksi dan persediaan	Pisahkan bijih, barang dalam proses, produk jadi, dan barang milik perusahaan yang berada di pemurni. Biaya produksi perlu dialokasikan secara masuk akal.
Penjualan dan piutang	Hubungkan pengakuan pendapatan dengan kontrak, penyerahan, dan syarat standar; pisahkan uang muka dari pendapatan.
Reklamasi dan pascatambang	Pisahkan jaminan yang ditempatkan, kewajiban/provisi, dan biaya pelaksanaan. Deduksi fiskal perlu diuji tersendiri.
Pajak dan royalti	Buat akun berbeda untuk PPh dibayar di muka, utang potongan, PPN, royalti, dan pajak daerah.

Satu transaksi, dua penelaahan

Akuntansi menilai pengakuan dan penyajian menurut SAK yang dipilih. Pajak menilai penghasilan dan biaya menurut ketentuan fiskal. Perbedaan dicatat dalam rekonsiliasi, bukan dengan mengubah bukti transaksi.

Untuk SAK Indonesia, eksplorasi/evaluasi memiliki PSAK 106. Persediaan, aset tetap, penurunan nilai, pendapatan, dan provisi tetap mengikuti standar terkait. SAK EP memiliki ketentuannya sendiri; jangan menyalin kebijakan SAK Indonesia tanpa penelaahan.

Emas, nikel, perak, dan tembaga

Keberadaan mineral berbeda dari status tambang berproduksi. Contoh wilayah di bawah bukan daftar lengkap konsesi Sulawesi.

Komoditas	Bentuk / istilah yang sering ditemui	Konteks Sulawesi
Emas / gold (Au)	Bijih emas; dore (campuran logam hasil peleburan awal); bullion atau emas batangan.	Contoh sumber emas: Pani, Pohuwato, Gorontalo. Bentuk produk harus dibuktikan pada setiap transaksi.
Nikel / nickel (Ni)	Bijih laterit: saprolit dan limonit. Olahan: NPI, ferronickel, matte, MHP.	Sorowako (Sulsel), Bahodopi/Morowali (Sulteng), dan Pomalaa (Sultra) merupakan contoh wilayah kegiatan/proyek nikel.
Perak / silver (Ag)	Dapat menjadi mineral ikutan emas; terkandung dalam dore atau produk pemurnian.	Pani melaporkan kandungan perak dalam cadangan bijihnya. Bukan berarti setiap tambang menjual perak terpisah.
Tembaga / copper (Cu)	Bijih, konsentrat (mineral diperkaya), anoda, dan katoda hasil pemurnian.	Gorontalo Minerals memiliki proyek tembaga-emas di Bone Bolango. Alur produksi pada panduan bersifat umum, bukan klaim operasinya.

Pertanyaan sebelum membuka tabel pajak

Apakah yang dijual bijih, konsentrat, campuran logam, atau logam murni? Siapa pemiliknya? Apa hasil assay, proses, dan sertifikatnya? Nama dagang saja belum cukup.

Publikasi perusahaan dipakai hanya untuk contoh lokasi/proyek dan karakter produk; bukan dasar hukum pajak. Istilah teknis diterangkan lebih lanjut pada halaman 11.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Kenali bentuk barang yang dijual

Bijih, dore, konsentrat, dan logam murni memiliki karakter berbeda.

[34] Badan Geologi - GeoRIMA dan neraca mineral · [35] Merdeka Gold Resources - profil Pani · [36] Bumi Resources Minerals - Gorontalo Minerals · [37] Vale - operasi dan proyek nikel Sulawesi

Mineral ikutan dan bahan bangunan

Sulawesi juga memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan. Periksa komoditas dalam izin dan data geologi lokasi.

Komoditas / istilah	Mengenalnya secara sederhana	Fokus admin
Kobalt / cobalt (Co)	Dapat berasosiasi dengan nikel laterit dan ikut dalam produk antara MHP.	Rekam kadar serta nilai mineral ikutan; jangan otomatis memakai pembebasan bijih nikel untuk produk kobalt.
Besi / iron (Fe)	Dapat hadir dalam mineralisasi atau produk paduan, termasuk ferronickel.	Bedakan bijih besi, kandungan besi dalam bijih nikel, dan produk paduan.
Batu kapur / limestone	Sering disebut batugamping; bahan baku semen/kapur.	Bedakan batu sumber, bahan yang diolah, dan semen.
Marmer / marble; andesit	Marmer: batuan metamorf. Andesit: batuan beku yang digunakan antara lain sebagai material bangunan.	Tentukan apakah blok/batuan, hasil potong, agregat, atau produk jadi.
Pasir, kerikil, pasir kuarsa	Sirtu = pasir dan batu; silica/quartz sand = pasir kuarsa.	Catat volume, kualitas, lokasi pengambilan, satuan jual, dan jenis proses.

Daftar geologi bukan daftar fasilitas pajak

PP 49/2022 menyebut jenis barang dan syarat pembebasan. Pajak MBLB memakai daftar objek dan ketentuan daerah. Kedua daftar tersebut tidak boleh dianggap sama. Tinjau izin, spesifikasi barang, dan aturan yang relevan.

Keberadaan, cadangan ekonomis, dan izin penambangan merupakan tiga hal berbeda. Daftar ini tidak menyatakan semua komoditas tersedia atau boleh ditambang di setiap kabupaten.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Lokasi dan produk harus jelas

Gunakan izin, data geologi, dan bukti proses sebagai titik awal.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

Pahami satuan sebelum menghitung

Kesalahan satuan dapat membuat invoice salah walaupun tarif pajaknya benar.

Istilah	Arti praktis
Ore / bijih; grade / kadar; assay	Batuan yang mengandung mineral bernilai; proporsi kandungannya; hasil pengujian komposisi/kadar.
Stockpile; lot / batch; recovery	Tempat/tumpukan stok; kelompok barang yang ditelusuri bersama; persentase logam yang berhasil diperoleh dalam proses.
WMT / DMT; moisture	Wet metric tonne = ton basah; dry metric tonne = ton kering; moisture = kadar air.
RKEF; HPAL	Rotary Kiln-Electric Furnace = pengolahan dengan tanur putar dan tanur listrik. High Pressure Acid Leach = pelindian asam bertekanan tinggi.
NPI / FeNi; matte; MHP	Nickel pig iron / ferronickel: paduan besi-nikel. Matte: produk sulfida kaya nikel. Mixed hydroxide precipitate: produk antara hidroksida, dapat mengandung Ni dan Co.
Concentrate; payable; TC/RC	Konsentrat: mineral diperkaya. Payable: bagian logam yang dibayar pembeli. Treatment/refining charges: biaya pengolahan/pemurnian.

Contoh: 10.000 ton basah, kadar air 30%

7.000 ton kering (70%)	3.000 ton air
-------------------------------	----------------------

$DMT = WMT \times (1 - \text{kadar air})$. Ini ilustrasi dengan kadar air berbasis berat basah. Kandungan logam masih perlu dihitung dari kadar dan basis assay yang benar; 7.000 DMT bukan 7.000 ton nikel.

[35] Merdeka Gold Resources - profil Pani · [36] Bumi Resources Minerals - Gorontalo Minerals · [37] Vale - operasi dan proyek nikel Sulawesi · [38] Harita Nickel - teknologi RKEF dan HPAL · [39] Copper Development Association - alur tembaga

Dari izin menuju produksi

Tahap ini berlaku secara umum. Diagram menunjukkan kewajiban yang perlu diuji, bukan pajak yang otomatis terutang di setiap langkah.



Lintas tahap: PPh badan dinilai dari hasil usaha tahunan. Royalti/PNBp adalah penerimaan negara bukan pajak; DHE adalah kewajiban devisa. Label PPN tidak berarti seluruh transaksi menggunakan tarif umum.

Bijih dapat menempuh dua jalur

Pilih jalur menurut karakter bijih dan fasilitas. RKEF dan HPAL bukan urutan wajib yang dilewati seluruh nikel.

1

Penambangan dan pemisahan bijih

Catat saprolit/limonit, tonase, kadar air, kadar Ni dan mineral ikutan.

LABEL: PPh 21; PPh 23/PPN vendor. PNBP sesuai ketentuan.

2

Stockpile, timbang, assay, lalu jual bijih

Jika penjualan berhenti di sini, hubungkan invoice dengan lot dan hak atas barang.

LABEL: PPN dibebaskan jika memenuhi PP 49; PPh 22 pembelian mineral bila syaratnya terpenuhi; royalti.

3

Jika diolah: pilih teknologi yang sesuai

Ringkasan dua jalur ditunjukkan di bawah. Beli-putus berbeda dari jasa pengolahan milik pelanggan.

LABEL: PPN atas output diuji ulang; PPh 23/PPN jika jasa pengolahan sesuai objek.

JALUR PANAS / RKEF

Umumnya saprolit → pengeringan/kalsinasi → peleburan → **NPI atau ferronickel**.

Nickel matte merupakan produk jalur pengolahan tertentu; tidak identik dengan NPI.

JALUR PELINDIAN / HPAL

Umumnya limonit → pelindian bertekanan → pemisahan/pengendapan → **MHP**.

Pemrosesan lanjutan dapat menghasilkan bahan kimia nikel/kobalt.

Penjualan produk olahan / ekspor yang diizinkan

LABEL: PPN domestik sesuai output atau PPN ekspor 0% jika memenuhi syarat; PPh 22 sesuai jalur; royalti/PNBP sesuai produk; bea keluar jika tercakup. DHE SDA dinilai tersendiri. Panah ekspor bukan izin mengeksport bijih nikel.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [2] PMK 131 Tahun 2024 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [6] PP 19 Tahun 2025 · [37] Vale - operasi dan proyek nikel Sulawesi · [38] Harita Nickel - teknologi RKEF dan HPAL

Nilai logam mengikuti hasil uji

Alur disederhanakan; teknik pemisahan menyesuaikan karakter bijih. Perak dapat menjadi hasil ikutan.



Kontrol: sertakan hasil uji Au dan Ag dalam settlement. Fasilitas PPN tidak dipungut untuk emas batangan tertentu tidak otomatis berlaku pada perak atau dore. Bea keluar emas juga harus diuji dari uraian barang/HS, bukan warna logam.

Bijih, konsentrat, lalu logam

Contoh alur bijih sulfida. Bukan pernyataan bahwa seluruh tahapan ini sudah beroperasi di satu lokasi Sulawesi.



Jangan menghitung pajak hanya dari uang bersih

Pembeli dapat mengurangi biaya pengolahan/pemurnian dalam settlement. Pisahkan harga, potongan komersial, jasa, pajak, dan piutang sesuai kontrak. Dasar pajak atau royalti belum tentu sama dengan dana yang masuk bank.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [2] PMK 131 Tahun 2024 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [6] PP 19 Tahun 2025 · [36] Bumi Resources Minerals - Gorontalo Minerals · [39] Copper Development Association - alur tembaga

Dari pengambilan ke pelanggan

Batu kapur, andesit, marmer, pasir, dan kerikil memiliki ragam proses. Label mengikuti barang dan kegiatan sebenarnya.



Perlu diingat: MBLB timbul dari pengambilan material yang menjadi objek. Pedagang yang hanya membeli lalu menjual kembali tidak otomatis menjadi pengambil. Status batuan juga tidak otomatis memenuhi rumusan mineral bukan logam dalam jalur PPh 22 pertambangan.

Pedagang dan kontraktor berbeda

Tidak setiap usaha di sekitar tambang memiliki hasil tambangnya. Tentukan peran lebih dahulu.

PEDAGANG / TRADER

1. Beli barang

Simpan izin/asal barang, kontrak, dan bukti terima.
LABEL: PPh 22 bila wajib memungut; PPN pembelian.

2. Simpan dan kirim

Catat persediaan serta ongkos angkut.
LABEL: PPh 23/15 dan PPN jasa sesuai objek.

3. Jual barang

Akui penjualan bruto dan harga pokok.
LABEL: PPN produk; PPh 22 jika ada penunjukan relevan.

KONTRAKTOR / OPERATOR

1. Kontrak pekerjaan

Tetapkan ruang lingkup dan hak atas mineral.
LABEL: identifikasi PPh 23/final/26 dan PPN.

2. Laksanakan jasa

Catat jam alat, tenaga kerja, dan progres.
LABEL: PPh 21; PPh/PPN vendor; PAB jika objeknya ada.

3. Tagih imbalan

Akui pendapatan jasa, simpan berita acara.
LABEL: PPh 23/final sesuai jasa; PPN sesuai rezim.

Jika hanya mengolah barang milik pelanggan

Pengolah mencatat persediaan milik pelanggan dalam catatan pengawasan, bukan sebagai barang miliknya. Pendapatannya berupa imbalan jasa. Pemilik mencatat persediaan di pihak ketiga serta biaya pengolahan menurut kebijakan yang berlaku.

Jembatan ke bab berikut: setelah alur barang, uang, dan dokumen jelas, gunakan peta kewajiban serta pembahasan rinci PPh, PPN, royalti, daerah, dan ekspor. Tarif selalu dibaca bersama syaratnya.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Hak atas barang menentukan catatan

Pendapatan penjualan barang berbeda dari imbalan pengolahan.

Kenali transaksi sebelum tarif

Satu nama komoditas belum cukup untuk menentukan pajaknya.

Pertanyaan awal	Informasi yang harus tersedia
Siapa pelaku usahanya?	Pemegang IUP/IUPK/IPR, pihak kontrak khusus, pedagang, pengolah, kontraktor, atau eksportir.
Apa barang atau jasanya?	Bijih langsung dari sumber, produk olahan, dore, emas batangan, material batuan, atau jasa. Sertakan kadar dan prosesnya.
Di mana kegiatannya?	Koordinat/lokasi tambang dan wilayah pajak daerah; bedakan dengan kantor pusat, gudang, dan pabrik.
Siapa pembelinya?	Badan usaha biasa, pemungut yang ditunjuk, pemerintah, BUMN, LJK bulion, atau pihak luar negeri.
Kapan hak dan tagihan timbul?	Kontrak, serah terima, pembayaran, faktur, serta periode ekspor/harga acuan. Saat terutang dapat berbeda antarjenis pungutan.

Tiga penanda dalam panduan

Aturan: ketentuan yang dirujuk ke sumber resmi. **Ilustrasi:** angka rekaan untuk menjelaskan mekanisme.

Verifikasi transaksi: keputusan yang memerlukan izin, produk, kontrak, atau peraturan daerah tertentu.

Panduan ini mengutamakan perusahaan dalam rezim pajak umum. KK dan IUPK kelanjutan operasi dapat memiliki perlakuan khusus. Fasilitas kawasan, investasi, atau perpajakan kontraktual tidak dianggap berlaku tanpa bukti pemenuhan syarat.

Berkas pertama yang diminta

NPWP dan status PKP, akta/bentuk usaha, izin dan komoditasnya, RKAB yang berlaku, contoh kontrak penjualan, spesifikasi produk, lokasi tambang, serta tiga contoh invoice pembelian dan penjualan.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Lihat barang dan izinnya

Sampel, proses, lokasi, dan pemegang izin membantu menentukan perlakuan transaksi.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [4] PMK 61/PMK.03/2021 · [5] PP 37 Tahun 2018

Peran perusahaan menentukan alur

Pisahkan pemilik mineral, pemilik persediaan, dan pemberi jasa dalam kontrak maupun pembukuan.

Peran	Penghasilan utama	Fokus pajak dan bukti
Pemegang izin tambang	Penjualan/penyerahan hasil tambang	Rezim fiskal izin; PPN produk; PPh 22; PNBP; kewajiban lokasi.
Pedagang material	Penjualan persediaan yang dibeli	Legalitas asal; harga beli/jual; status pemasok; pemungutan PPh 22 sesuai kondisi.
Smelter/pengolah	Penjualan hasil olahan atau imbalan pengolahan	Tentukan beli-putus atau jasa; produk keluaran dapat berbeda perlakuan PPN.
Kontraktor/operator	Imbalan penambangan atau jasa	PPh 23/rezim jasa terkait; PPN jasa; biaya alat dan tenaga kerja.
Eksportir	Penjualan ke luar negeri	Hak ekspor produk, dokumen pabean, PPh 22, bea keluar, PPN ekspor, dan DHE.

Contoh: operator menjual atas nama pemegang izin

PT Pemilik IUP menyerahkan pekerjaan produksi kepada PT Operator. Pembeli membayar ke rekening yang ditunjuk operator. Aliran uang ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa operator memiliki seluruh hasil tambang. PMK 61/2021 mengatur penghasilan pemegang izin dan imbalan mitra secara tersendiri; kontrak dan pengakuan pendapatan harus mengikuti peran hukumnya.^[4]

Kontrol sebelum penjualan pertama

Tuliskan pihak yang menjual, menerbitkan invoice, menerima pembayaran, menanggung susut/kadar, menerima bukti pungut, dan membayar royalti. Cocokkan semuanya dengan pemegang izin dan hak atas produk.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Siapa pemilik hasil tambang?

Pemilik mineral, pengolah, dan pemberi jasa dapat memiliki alur pajak yang berbeda.

[3] PMK 51 Tahun 2025 · [4] PMK 61/PMK.03/2021 · [5] PP 37 Tahun 2018

Pajak, royalti, dan kas

Ketiganya perlu dihitung terpisah agar biaya usaha dan saldo pajak tidak tercampur.

Kewajiban	Pemicu / dasar	Dampak utama
PPH badan	Penghasilan kena pajak; rezim khusus perlu diuji	Beban pajak tahunan dikurangi kredit pajak.
PPH 22	Pembelian/ekspor tertentu; status pelaku dan produk	Umumnya pembayaran di muka PPh penjual/eksportir untuk transaksi tambang yang dibahas.
PPH 21/23/26 atau final	Gaji, jasa, sewa, dan pembayaran tertentu	Kewajiban potong/setor pada pembayar; perlakuan bergantung objek.
PPN	Penyerahan/impor sesuai status barang/jasa	Dapat terutang, dibebaskan, tidak dipungut, atau ekspor bertarif 0%.
PNBP / royalti / iuran tetap	Hak dan kegiatan pertambangan; produk, harga, volume, izin	Bukan kredit PPh 22 dan bukan pengganti pajak daerah.
MBLB dan opsen	Pengambilan mineral bukan logam/batuan yang menjadi objek	Pajak lokal berbasis nilai hasil pengambilan.
PBB, PAB, pajak air	Objek tanah/bangunan, alat berat, atau pemanfaatan air	Periksa otoritas, penilaian, dan lokasi.
Bea keluar dan DHE	Ekspor yang termasuk cakupan masing-masing aturan	Bea keluar merupakan pungutan; DHE mengatur penerimaan/penempatan devisa.

Implikasi untuk anggaran: buat akun terpisah untuk pajak dipotong pihak lain, utang potongan pajak vendor, PPN, royalti, pajak daerah, dan dana DHE. Saldo kas yang tersedia tidak sama dengan laba bersih.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Pisahkan dalam pembukuan

Pajak, royalti, dan kas tersedia perlu dicatat pada akun yang berbeda.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [6] PP 19 Tahun 2025 · [8] UU 1 Tahun 2022 · [19] Bank Indonesia

Mulai dari laba fiskal

Tarif umum badan adalah 22%; fasilitas dan rezim pertambangan khusus harus diperiksa sebelum dipakai.

Laba menurut laporan keuangan disesuaikan secara fiskal: penghasilan nonfinal dipisahkan dari penghasilan final/bukan objek, biaya diuji, dan penyusutan serta amortisasi direkonsiliasi. Setelah memperhitungkan kompensasi kerugian yang masih dapat digunakan, diperoleh penghasilan kena pajak.

Ilustrasi perusahaan dalam rezim umum dengan Pasal 31E

Asumsi: badan dalam negeri, seluruh omzet Rp12 miliar merupakan usaha nonfinal, penghasilan kena pajak Rp2 miliar, dan memenuhi fasilitas Pasal 31E. Untuk omzet sampai Rp50 miliar, pengurangan tarif 50% berlaku pada bagian yang terkait peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.^[11]

Perhitungan	Hasil
Bagian laba yang mendapat fasilitas: $4,8 / 12 \times \text{Rp2 miliar}$	Rp800 juta
PPh bagian fasilitas: $11\% \times \text{Rp800 juta}$	Rp88 juta
PPh bagian lainnya: $22\% \times \text{Rp1,2 miliar}$	Rp264 juta
Jumlah PPh terutang	Rp352 juta
Dikurangi PPh 22 Rp150 juta dan PPh 25 Rp120 juta	Rp270 juta
PPh kurang bayar tahunan (ilustrasi)	Rp82 juta

Omzet kecil bukan otomatis PPh final 0,5%

PP 20/2026 mengubah kelayakan skema UMKM. PT biasa, CV, firma, dan BUMDes yang baru terdaftar setelah aturan berlaku tidak masuk kelompok pengguna baru. Pengguna lama perlu memeriksa transisi. Uji juga ketentuan khusus pertambangan; jangan menyalin skema panduan UMKM ke perusahaan tambang.^[10]



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Laba fiskal menjadi titik awal

Omzet menunjukkan ukuran usaha. Penghasilan kena pajak menentukan PPh dalam rezim umum.

[5] PP 37 Tahun 2018 · [10] DJP · [11] DJP

Pisahkan biaya operasi dan investasi

Pengeluaran kas, beban akuntansi, dan pengurang pajak dapat diakui pada waktu yang berbeda.

Pos	Perlakuan yang perlu diperiksa
Bahan bakar, tenaga kerja, pengangkutan	Kaitan dengan memperoleh penghasilan; bukti pemakaian, kontrak, dan potongan pajak. Alokasikan ke persediaan/biaya sesuai substansi.
Alat berat, pabrik, jalan, bangunan	Uji kapitalisasi dan penyusutan fiskal; umur buku belum tentu sama dengan umur fiskal.
Eksplorasi, pengembangan, pengupasan tanah	Pisahkan tahap, manfaat, serta jenis hak/aset. Uji aturan amortisasi pertambangan dan alokasi ke produksi.
Royalti dan pajak daerah	Cocokkan dasar hitung dan bukti bayar. Pengakuan biaya tetap mengikuti aturan fiskal dan periode manfaat.
Reklamasi dan pascatambang	Bedakan jaminan/deposito, biaya pelaksanaan, serta cadangan. Cadangan hanya dapat dikurangkan jika memenuhi ketentuan yang mengizinkannya.
CSR, sumbangan, infrastruktur sosial	Tujuan sosial tidak otomatis membuat biaya dapat dikurangkan. Uji kategori, persyaratan khusus, dan bukti. ^[29]
Bunga dan biaya kepada afiliasi	Uji substansi, kewajaran, batas fiskal, dan dokumentasi; invoice afiliasi saja belum cukup.

Contoh alat berat

Pembelian excavator Rp3 miliar dicatat sebagai aset ketika memenuhi syarat pengakuan aset. Jangan membebankan Rp3 miliar sekaligus hanya karena sudah dibayar. Buat register yang memuat tanggal siap digunakan, harga perolehan termasuk unsur yang relevan, kelompok fiskal, metode, dan rekonsiliasi penyusutan.^[12]

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Alat bekerja lebih dari satu periode

Pembelian alat berat perlu masuk register aset dan diuji penyusutannya.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[5] PP 37 Tahun 2018 · [12] PMK 72 Tahun 2023 · [23] PMK 172 Tahun 2023 · [29] PMK 62/PMK.03/2021

Bentuk produk mengubah perlakuan

“Hasil tambang” bukan satu kategori PPN untuk semua barang.

Barang / transaksi domestik	Titik awal analisis PPN
Bijih nikel, emas, perak, dan tembaga yang langsung diambil dari sumber	Dibebaskan apabila memenuhi daftar dan syarat PP 49/2022.
Pasir/kerikil dan jenis batuan langsung dari sumber yang disebut dalam PP 49	Dibebaskan jika memenuhi karakter barang. Proses dan spesifikasi tetap perlu didokumentasikan.
NPI, ferronickel, nickel matte, MHP, atau produk pengolahan lain	Jangan mewariskan pembebasan bijih. Uji sebagai produk keluaran; penyerahan umum nonmewah mengikuti mekanisme PPN yang berlaku.
Dore / konsentrat emas	Bukan otomatis bijih atau emas batangan berkualifikasi. Verifikasi kadar, proses, bentuk, HS, dan aturan khusus.
Emas batangan noncadangan devisa	PPN tidak dipungut jika memenuhi definisi dan syarat PP 49/2022; antara lain kemurnian paling rendah 99,99% bersertifikat.
Batu bara	Dikecualikan dari kelompok hasil tambang yang mendapat pembebasan tersebut.
Beton, paving, aspal campuran	Merupakan produk olahan; tidak otomatis mengikuti pembebasan material sumbernya.

PPN umum nonmewah: $12\% \times$ dasar pengenaan nilai lain $11/12$ dari harga jual/penggantian menghasilkan beban efektif 11%. Angka ini tidak menggantikan ketentuan khusus, misalnya skema emas tertentu, fasilitas, atau ekspor. Status PKP dan saat terutang tetap diperiksa.^[2]



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Bijih dan hasil olahan berbeda

Ketika proses mengubah produk, periksa kembali klasifikasi PPN keluarannya.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [2] PMK 131 Tahun 2024 · [15] PMK 48 Tahun 2023 · [16] PMK 52 Tahun 2025

Pembebasan memengaruhi biaya

PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut, dan ekspor 0% mempunyai akibat yang berbeda.

Jenis penyerahan	PPN keluaran	Pajak Masukan terkait
Dibebaskan	Tidak dibebankan dengan fasilitas pembebasan	Tidak dapat dikreditkan untuk perolehan yang terkait penyerahan dibebaskan.
Tidak dipungut	Ada fasilitas tidak memungut PPN	Dapat dikreditkan sepanjang syarat pengkreditan dan fasilitas terpenuhi.
Ekspor BKP berwujud	Tarif 0% jika ekspor memenuhi ketentuan	Dapat dikreditkan sesuai persyaratan; bukan jaminan restitusi otomatis.
Terutang biasa	Mengikuti dasar dan tarif yang berlaku	Dapat dikreditkan jika memenuhi syarat formal/material.

Ilustrasi jasa angkut untuk penjualan bijih yang dibebaskan

Asumsi vendor PKP menagih jasa biasa Rp100 juta dan PPN Rp11 juta. Seluruh jasa digunakan untuk penyerahan bijih yang dibebaskan. PPN Rp11 juta tidak diperlakukan sebagai kredit Pajak Masukan; alokasikan sebagai unsur biaya/perolehan sesuai sifat pengeluaran. Uji pemotongan PPh jasa secara terpisah.

Jika satu perusahaan menjual bijih dan produk olahan

Tandai pembelian yang khusus untuk masing-masing alur. Untuk biaya bersama, susun alokasi Pajak Masukan sesuai ketentuan pengkreditan, lalu lakukan penghitungan kembali bila diwajibkan. Rasio omzet buku semata belum tentu merupakan perhitungan fiskal yang benar.

Kontrol faktur

Kode faktur/fasilitas, identitas pembeli, uraian produk, nilai dasar, dan dokumen pendukung harus konsisten. Pembebasan barang bukan alasan untuk mengabaikan administrasi PKP atau kewajiban pelaporan yang berlaku.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

PPN pembelian bisa menjadi biaya

Penggunaan jasa atau alat menentukan apakah Pajak Masukan dapat dikreditkan.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [2] PMK 131 Tahun 2024

Pembeli memungut, penjual mengkreditkan

Dasar terbaru yang digunakan di panduan ini adalah PMK 51 Tahun 2025.

Badan usaha yang membeli batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari pemegang izin usaha pertambangan termasuk pemungut PPh 22. Tarif pada jalur ini adalah **1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN**. Periksa pengecualian dan kemungkinan pembeli sudah memungut menurut penunjukan lain.^[3]

Ilustrasi penjualan bijih nikel domestik	Nilai
Harga penjualan; diasumsikan memenuhi pembebasan PPN	Rp1.000.000.000
PPh 22: 1,5% × Rp1 miliar	Rp15.000.000
Kas yang diterima penjual setelah pungutan	Rp985.000.000
Pendapatan yang dicatat penjual	Rp1.000.000.000
Pajak dibayar di muka pada penjual	Rp15.000.000

Tiga pemeriksaan yang mencegah salah pungut

- 1. Asal barang.** Pembelian dari pedagang yang bukan pemegang izin tidak otomatis mengikuti jalur pembelian dari pemegang izin. Uji apakah ada penunjukan pemungut lain yang relevan.
- 2. Klasifikasi.** Batuan dalam izin tidak serta-merta sama dengan “mineral bukan logam” pada rumusan PPh 22. Pajak MBLB daerah tidak membuktikan bahwa seluruh penjualan pasir/batu terkena jalur 1,5% ini.
- 3. Satu mekanisme yang tepat.** Jangan menumpuk dua pungutan 1,5% hanya karena pembeli sekaligus BUMN dan pembeli mineral. Periksa ketentuan pengecualian tumpang tindih dalam PMK 51/2025.

Bukti yang harus kembali ke penjual

Bukti pungut dengan identitas penjual, masa, dan nilai yang benar. Cocokkan dengan invoice dan penerimaan bank sebelum digunakan sebagai kredit pajak tahunan. Pungutan tambang ini bersifat tidak final.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Kas bersih bukan omzet

Simpan bukti pungut. Pendapatan penjual tetap dicatat sebesar nilai bruto transaksinya.

[3] PMK 51 Tahun 2025

Mulai dari tonase dan kadar

Kontrak nikel perlu menyambungkan ukuran fisik, harga, dan dokumen fiskal.

Penjualan bijih nikel langsung dari sumber perlu dibedakan dari NPI, ferronickel, matte, MHP, dan produk pemurnian. Perubahan proses dapat mengubah klasifikasi PPN dan pos tarif royalti. Perbedaan kadar atau kadar air juga dapat mengubah nilai tagihan tanpa perubahan tarif pajak.

Ilustrasi WMT dan DMT

Ukuran ilustratif	Perhitungan
Tonase basah / wet metric tonne (WMT)	10.000 WMT
Kadar air / moisture	30%
Tonase kering / dry metric tonne (DMT)	$10.000 \times (1 - 30\%) = 7.000 \text{ DMT}$
Harga rekaan bila kontrak memakai USD40/DMT	$7.000 \times \text{USD}40 = \text{USD}280.000$
Bila harga yang sama ternyata per WMT	$10.000 \times \text{USD}40 = \text{USD}400.000$

Selisih USD120.000 di atas berasal dari satuan kontrak. Angka USD40 bukan harga pasar atau HPM. Contoh ini hanya menunjukkan mengapa satuan harus terkunci sebelum menghitung invoice, royalti, dan pajak.

Satu paket dokumen untuk satu lot

Hubungkan nomor lot dengan timbang masuk/keluar, survei volume, certificate of analysis, hasil uji kadar air, kontrak, berita acara serah terima, invoice sementara/final, dan bukti pungut. Simpan alasan penyesuaian kadar, penalti, bonus, dan selisih timbang.

HMA, HPM, dan harga kontrak berbeda fungsi

HMA merupakan acuan mineral; HPM adalah patokan dengan formula yang relevan; invoice mengikuti transaksi yang harus tetap memenuhi ketentuan harga. Jangan memakai satu angka untuk seluruh dasar pungutan tanpa memeriksa aturan masing-masing.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Tonase harus memakai satuan yang sama

Bedakan berat basah, berat kering, dan kadar air sebelum menghitung nilai penjualan.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [6] PP 19 Tahun 2025 · [7] Permen ESDM 9 Tahun 2025

Tentukan tarif per produk dan periode

Rujukan status yang ditemukan: PP 19/2025 berlaku dan mencabut PP 26/2022. Prosedur PNBP dirujuk ke Permen ESDM 9/2025.

Langkah	Berkas / keputusan
1. Rezim izin	IUP/IUPK/kontrak; periksa ketentuan khusus dan hak atas produk.
2. Jenis pungutan	Pisahkan iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan kewajiban PNBP lain yang relevan.
3. Bentuk komoditas	Bijih, produk olahan, mineral utama atau ikutan; jangan memakai pos bijih untuk semua hasil hilirisasi.
4. Periode dan harga	Simpan HMA/HPM atau dasar lain yang diwajibkan serta kurs/satuan yang benar untuk periode transaksi.
5. Tarif dan fasilitas	Cocokkan langsung dengan baris lampiran peraturan; tarif khusus memerlukan bukti syarat.
6. Pembayaran dan koreksi	Cocokkan volume, kualitas, billing, bukti bayar, dan penjualan final; telusuri kurang/lebih bayar sesuai prosedur.

Simulasi anggaran, bukan penetapan tarif

Jika basis royalti yang telah diverifikasi Rp1 miliar dan tarif ilustratif $r = 15\%$, royalti adalah Rp150 juta. Bila r berubah menjadi 16%, hasilnya Rp160 juta. Perubahan satu poin persentase mengubah anggaran Rp10 juta. Angka 15% dan 16% di sini hanya asumsi sensitivitas; bukan keputusan tarif suatu pengiriman.

Batas verifikasi edisi ini

Lampiran tarif lengkap PP 19/2025 belum berhasil dibaca dari sumber resmi. Karena itu, panduan tidak mencantumkan rentang/batas HMA atau tabel royalti komoditas sebagai angka terverifikasi. Sebelum membuat billing, lampirkan salinan baris tarif resmi dan penghitungan yang telah ditelaah. Wacana perubahan tarif tidak diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Dari lot ke billing royalti

Hubungkan produk, volume, hasil uji, periode harga, dan pos tarif resmi.

Bijih, dore, dan bullion

Kadar saja tidak cukup: bentuk barang, proses, sertifikat, dan pelaku transaksi ikut menentukan perlakuan.

Tahap / produk	Pemeriksaan utama
Bijih emas langsung dari sumber	Uji pembebasan PPN PP 49; PPh 22 pembelian mineral dari pemegang izin; royalti produk utama/ikutan.
Konsentrat atau dore	Dokumentasikan proses, assay, komposisi emas/perak, bentuk, dan HS. Jangan langsung menyebutnya emas batangan berkualifikasi.
Emas batangan memenuhi syarat PP 49	Uji fasilitas PPN tidak dipungut: noncadangan devisa, kemurnian dan sertifikasi yang disyaratkan.
Perhiasan dan perdagangan emas tertentu	Gunakan kerangka PMK 48/2023 beserta perubahannya; pelaku dan jenis penyerahan menentukan kewajiban.
Jasa pemurnian / pengolahan	Pastikan siapa pemilik emas dan apakah pembayaran merupakan jasa atau pembelian produk.

Ilustrasi rekonsiliasi kandungan emas

Dore 100 kg dengan hasil uji emas 90% mengandung 90 kg emas secara perhitungan fisik sederhana. Nilai yang dibayar pembeli masih dipengaruhi payable percentage, refining charge, kandungan perak, dan ketentuan kontrak. Jangan menyamakan berat dore 100 kg dengan 100 kg emas murni.

Jika dore dikirim ke pemurni tetapi kepemilikan tetap pada perusahaan tambang, pengiriman itu perlu ditelusuri sebagai persediaan pada pihak ketiga. Jika terdapat jual beli dan perpindahan hak, perlakuannya berbeda. Dokumentasikan keputusan sebelum menerbitkan invoice.

Berkas minimum emas

Assay independen, nomor batch/bar, berat, kadar, sertifikat bila dipersyaratkan, kontrak pemurnian/offtake, hasil settlement, serta bukti asal dan kepemilikan produk.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Dore belum tentu emas murni

Berat produk perlu dibaca bersama kadar dan hasil pengujian laboratorium.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [15] PMK 48 Tahun 2023 · [16] PMK 52 Tahun 2025

Tarif mengikuti jalur transaksi

Tarif 0,25% untuk transaksi emas tertentu tidak dapat diterapkan kepada semua penjualan tambang emas.

Jalur	Perlakuan awal
Pembelian mineral dari pemegang izin oleh badan usaha	Uji jalur PPh 22 pertambangan 1,5%, termasuk klasifikasi output dan pengecualiannya.
Pembelian emas batangan oleh LJK bulion berizin OJK	PMK 51/2025 menetapkan 0,25% dari harga pembelian di luar PPN; syarat serta pengecualian tetap diperiksa.
Impor emas batangan	PMK 51/2025 menetapkan PPh 22 impor 0,25% dari nilai impor; fasilitas/pengecualian perlu diuji.
Penjualan oleh pabrik/pedagang emas dalam skema khusus	Baca PMK 48/2023 dan perubahan 2025; tujuan penyerahan dan status pembeli dapat mengubah kewajiban.
Pembelian oleh BUMN / pemungut lain	Periksa ketentuan yang tepat, termasuk pengaturan khusus LJK bulion. Hindari pungutan ganda.

Ilustrasi pembelian bullion oleh LJK

Asumsi seluruh persyaratan jalur LJK bulion terpenuhi dan transaksi tidak dikecualikan. Nilai pembelian Rp2 miliar di luar PPN menghasilkan PPh 22 sebesar **0,25% × Rp2 miliar = Rp5 juta**. Untuk menentukan kas dibayar, perlakuan PPN juga harus dipastikan secara terpisah.

Keputusan tertulis untuk dore

Sebelum memilih 1,5% atau skema lain, tim pajak perlu menyimpulkan klasifikasi barang dan penunjukan pemungut berdasarkan dokumen aktual. Keberadaan kata “emas” pada invoice belum cukup untuk memilih 0,25%.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Periksa barang dan pembelinya

Bentuk emas serta status pihak yang bertransaksi menentukan jalur pemungutan.

[3] PMK 51 Tahun 2025 · [15] PMK 48 Tahun 2023 · [16] PMK 52 Tahun 2025

Bea keluar mulai 23 Desember 2025

PMK 80/2025 mengatur jenis emas tertentu berdasarkan bentuk, HS, dan harga referensi. Ekspor tetap memerlukan pemeriksaan izin produknya.

Dua kolom tarif berikut mengikuti harga referensi emas dalam peraturan: **A: $\text{USD}2.800 \leq \text{harga} < \text{USD}3.200$ per troy ounce**; **B: $\text{harga} \geq \text{USD}3.200$** . Harga referensi bukan harga invoice atau harga ritel harian. Tabel tidak menetapkan perlakuan harga di bawah rentang tersebut.

Barang sesuai lampiran	Pos tarif (ex)	A	B
Dore: bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya	7108.12.10 / 7108.12.90	12,5%	15%
Emas/paduan emas tidak ditempa: granula/bentuk lain selain dore	7108.12.90	10%	12,5%
Emas/paduan emas tidak ditempa: bongkah, ingot, batang tuangan selain dore	7108.12.10	7,5%	10%
Emas dalam bentuk minted bars	7115.90.10	7,5%	10%

Arti “ex”: hanya barang dengan uraian yang disebut yang masuk cakupan, bukan seluruh barang dalam pos HS tersebut. Klasifikasi kepabeanan perlu dicocokkan dengan spesifikasi fisik dan dokumen ekspor.

Ilustrasi bea keluar dore pada kolom B

Asumsi nilai hasil perkalian jumlah barang, harga ekspor resmi per satuan, dan kurs pabean adalah Rp10 miliar. Bea keluar = $15\% \times \text{Rp}10 \text{ miliar} = \text{Rp}1,5 \text{ miliar}$. Nilai Rp10 miliar adalah dasar ilustratif sesuai rumus, bukan otomatis nilai invoice.

Buat empat pemeriksaan terpisah

Bea keluar; PPh 22 ekspor apabila HS dan pelakunya termasuk cakupan; PPN ekspor dengan dokumen yang sah; serta DHE SDA. Membayar satu pungutan tidak menghapus tiga pemeriksaan lainnya.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Bentuk emas memengaruhi bea keluar

Cocokkan uraian barang, HS, dan harga referensi untuk ekspor yang dibahas.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[17] PMK 80 Tahun 2025 · [18] Bea Cukai Juanda

MBLB dihitung dari pengambilan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pajak daerah atas kegiatan pengambilan objek yang diatur.

Dasar pengenaan MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan, yang dihitung dari volume/tonase dikalikan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan sesuai ketentuan daerah. Dasar ini tidak otomatis sama dengan omzet penjualan termasuk pengiriman.

UU 1/2022 menetapkan batas tarif MBLB paling tinggi **20%** untuk kabupaten/kota; aturan khusus berlaku bagi daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom. Angka yang dipakai usaha di Sulawesi harus mengikuti Perda setempat. **Opsen MBLB sebesar 25% dari pajak MBLB terutang**, bukan dari nilai penjualannya.^[8]

Ilustrasi: asumsi Perda menetapkan MBLB 20%	Nilai
Volume pengambilan	1.000 m ³
Harga standar ilustratif	Rp100.000/m ³
Dasar MBLB: 1.000 × Rp100.000	Rp100.000.000
MBLB: 20% × Rp100 juta	Rp20.000.000
Opsen: 25% × Rp20 juta	Rp5.000.000
Total MBLB dan opsen	Rp25.000.000

20% + opsen 25% tidak berarti 45% dari dasar

Pada asumsi di atas, gabungannya setara 25% dari dasar MBLB. Apabila tarif daerah berbeda, hitung ulang: dasar × tarif MBLB × 1,25. Pastikan transaksi memang terkena MBLB dan opsen.

Pedagang yang hanya membeli dan menjual material tidak otomatis menjadi pihak yang melakukan pengambilan. Tinjau kegiatan aktual dan mekanisme daerah; klausul harga “sudah termasuk pajak” harus didukung bukti agar pungutan tidak dibukukan ganda.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Pengambilan material menjadi titik awal

Volume dan harga standar daerah membentuk dasar MBLB; opsen dihitung dari pajaknya.

[8] UU 1 Tahun 2022 · [9] DJPK

Lengkapi tarif daerah per lokasi

Gunakan lokasi objek pajak. Alamat kantor pusat tidak mewakili seluruh tambang, alat, dan pemanfaatan air.

Objek	Pemeriksaan dan dokumen
MBLB dan opsen	Perda kabupaten/kota lokasi pengambilan; jenis material, tarif, harga standar, satuan, serta mekanisme bayar/lapor.
Pajak Alat Berat (PAB)	Perda provinsi dan dasar nilai alat; pihak yang memiliki/menguasai. Batas tarif UU 1/2022 paling tinggi 0,2%.
Air permukaan / air tanah	Sumber air, izin/persetujuan, meter atau volume, nilai perolehan, dan pajak provinsi/kabupaten yang relevan.
Tanah dan bangunan tambang	Periksa klasifikasi PBB pusat sektor pertambangan. Kantor/gudang di luar cakupan bisa memerlukan telaah PBB-P2 tersendiri.
Listrik yang dihasilkan sendiri	Uji cakupan dan pengecualian PBJT tenaga listrik serta ketentuan daerah. Jangan menganggap semua genset otomatis sama.

Lembar verifikasi untuk Sulawesi

Untuk setiap lokasi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, atau Sulawesi Barat, catat: **nama kabupaten/kota; provinsi; objek; nomor Perda; aturan pelaksana; tanggal berlaku; dasar; tarif; tenggat; dan penanggung jawab**. Lampirkan naskah atau konfirmasi tertulis yang dapat ditelusuri.

Contoh penelusuran: Bitung

JDIH Kota Bitung memuat Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keberadaan aturan terkonfirmasi; pasal tarif serta keputusan harga standar belum terverifikasi dalam riset ini. Contoh MBLB pada halaman 31 bukan penetapan tarif Bitung atau seluruh Sulawesi.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Lokasi objek menentukan pemeriksaan

Catat kabupaten dan provinsi untuk material, alat berat, tanah, bangunan, serta air.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[8] UU 1 Tahun 2022 · [26] Kota Bitung · [28] PMK 186/PMK.03/2019

Baca pekerjaan di balik invoice

Nama “kontraktor tambang” tidak menentukan satu jenis pemotongan untuk seluruh tagihannya.

Pembayaran	Pemeriksaan PPh
Sewa alat berat tanpa hak opsi	Umumnya PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto di luar PPN; kontrak dengan operator perlu diuji substansinya.
Jasa teknik, manajemen, dan jasa lain yang termasuk daftar	Umumnya PPh 23 sebesar 2% di luar PPN; cek status penerima dan pengecualian.
Konstruksi nyata	Uji rezim PPh final jasa konstruksi berdasarkan pekerjaan dan kualifikasi. Tidak seluruh jasa tambang adalah konstruksi.
Angkutan darat atau laut	Bedakan jasa angkut, sewa kendaraan/kapal, dan usaha pelayanan; PPh 23 atau rezim PPh 15 dapat berbeda.
Sewa tanah/bangunan	Periksa PPh final sewa tanah/bangunan, bukan otomatis PPh 23 alat.
Gaji dan pembayaran ke orang pribadi / luar negeri	Uji PPh 21 atau PPh 26/perjanjian pajak sesuai status dan jenis penghasilan.

Ilustrasi jasa yang benar-benar terkena PPh 23

Asumsi jasa biasa dari vendor badan PKP Rp100 juta, PPN efektif 11%, tanpa fasilitas atau komponen pengurang jumlah bruto. Invoice Rp111 juta; PPh 23 = Rp2 juta; kas ke vendor = **Rp109 juta**. Pembayar menyetero Rp2 juta dan memberikan bukti potong. Kredit Pajak Masukan Rp11 juta tetap diuji menurut penggunaan jasa.

Untuk reimbursement, pemisahan biaya harus nyata dan didukung bukti sesuai ketentuan jumlah bruto. Menambahkan kata “penggantian biaya” pada invoice tidak otomatis mengeluarkannya dari dasar potong.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Baca apa yang dikerjakan

Sewa alat, jasa tambang, konstruksi, dan angkutan perlu dibedakan dalam kontrak.

Cocokkan hak, pendapatan, dan imbalan

Kerja sama produksi dapat menimbulkan salah saji jika perusahaan hanya mencatat kas bersih.

Ilustrasi pemegang izin dan operator

Pemegang izin menjual mineral kepada pembeli senilai Rp10 miliar. Perjanjian memberikan imbalan jasa Rp7 miliar kepada operator. Ilustrasi ini mengasumsikan hak atas hasil tambang serta pendapatan penjualan berada pada pemegang izin, dan operator memberikan jasa.

Pihak	Titik awal pencatatan
Pemegang izin	Pendapatan penjualan Rp10 miliar; biaya jasa Rp7 miliar jika memenuhi syarat; PPh/PPN/PNBP mengikuti kewajiban masing-masing.
Operator	Pendapatan imbalan jasa Rp7 miliar; biaya operasinya sendiri; kewajiban pajak jasa dan hak kredit bukti potong sesuai aturan.
Pembeli	Utang pembelian dan pemungutan yang relevan; bukti pungut harus atas pihak penjual yang benar.

Pemegang izin tidak cukup membukukan selisih Rp3 miliar sebagai seluruh omzet hanya karena operator menerima dana penjualan terlebih dahulu. PMK 61/2021 mengharuskan penelaahan seluruh penghasilan penjualan/penyerahan hasil tambang pada pemegang izin dan seluruh imbalan pada mitra.^[4]

Jika pihak-pihaknya berafiliasi

Dokumentasikan fungsi, aset, risiko, harga mineral, kadar, biaya pengolahan, dan syarat pembayaran. Harga yang memenuhi patokan mineral belum otomatis membuktikan seluruh transaksi afiliasi wajar. Uji kewajiban dokumentasi berdasarkan PMK 172/2023.^[23]

Klausul yang perlu jelas

Hak atas mineral dan hasil ikutan; formula imbalan; tanggung jawab royalti/pajak; hak pemeriksaan tonase; rekening penerimaan; koreksi settlement; dan kewajiban saling memberikan faktur serta bukti potong.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Kerja sama perlu pembagian yang jelas

Tentukan pemilik hasil tambang, penerbit invoice, penerima kas, dan imbalan operator.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[4] PMK 61/PMK.03/2021 · [23] PMK 172 Tahun 2023

Pisahkan pajak ekspor dari DHE

Peraturan DHE berubah lagi pada 2026. Jangan memakai ringkasan 2025 sebagai satu-satunya dasar.

Sebelum transaksi, pastikan produk boleh diekspor dan seluruh persyaratan perdagangan/kepabeaan terpenuhi. Pemenuhan pajak tidak dengan sendirinya memberikan hak ekspor. Setelah itu, cocokkan kontrak, invoice, PEB, volume, dan penerimaan valas.

Lapisan pemeriksaan	Yang perlu dilakukan
PPh 22 ekspor	Uji uraian barang/HS dan pengecualian pelaku. PMK 51/2025 menetapkan 1,5% dari nilai ekspor pada PEB untuk komoditas tambang yang dicakup.
PPN ekspor	Dokumentasikan penyerahan ekspor bertarif 0% sesuai syarat; bedakan dengan penjualan domestik yang dibebaskan.
Bea keluar	Periksa produk, HS, harga referensi, dan tarif yang berlaku. Emas tertentu dibahas pada halaman 30.
DHE SDA	Uji cakupan ekspor, tanggal dokumen, rekening/bank, jumlah, masa penempatan, penggunaan, dan pelaporan.

Kerangka DHE nonmigas dan ketentuan khusus

Penjelasan Kemenkeu atas aturan 2026 memuat penempatan umum DHE SDA nonmigas **100% selama paling singkat 12 bulan** melalui bank BUMN, dengan pembatasan konversi dan penggunaan yang diatur. Ini tidak berarti semua dana sama sekali tidak dapat digunakan; jenis pemanfaatan yang diizinkan memerlukan dokumen.^{[19][20]}

Pasal 18A menyediakan ketentuan khusus untuk eksportir yang memenuhi persyaratan, termasuk skema **minimal 30% selama paling singkat 3 bulan**. Status sebagai perusahaan tambang saja belum membuktikan kelayakan. Konfirmasi penetapan/daftar yang berlaku kepada bank dan otoritas sebelum memilih skema tersebut.^{[20][21]}

Kontrol kas: buat register per PEB yang menghubungkan tanggal ekspor, penerimaan, rekening penempatan, penggunaan yang diizinkan, dan tanggal berakhirnya kewajiban. Rincian daftar penerima fasilitas Pasal 18A tidak diverifikasi dalam edisi ini.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Barang keluar, dokumen tetap tersambung

Cocokkan pengiriman, PEB, tagihan, penerimaan valas, dan catatan DHE.

[3] PMK 51 Tahun 2025 · [19] Bank Indonesia · [20] Kementerian Keuangan · [21] Kemenko Perekonomian

Sediakan modulnya sendiri

Bagian ini membantu mencegah aturan batu bara terbawa ke mineral. Ini bukan panduan operasional batu bara lengkap.

Aspek	Mineral prioritas	Batu bara
PPN produk langsung dari sumber	Bijih nikel/emas dan material tertentu dapat dibebaskan jika memenuhi syarat.	Tidak termasuk pembebasan hasil tambang pada PP 49/2022.
PPh 22 pembelian	Periksa mineral logam/bukan logam, pemegang izin, dan status pembeli.	Tercakup jalur pembelian batu bara dari pemegang izin, dengan syarat/pengecualian.
Rezim fiskal	PP 37/2018 dan peraturan pelaksana serta kontrak/izin.	PP 15/2022 sebagaimana diubah PP 18/2025; izin/kontrak menentukan rincian.
Royalti/PNBP	Jenis produk, mineral utama/ikutan, harga, dan rezim izin.	Rezim izin, kualitas/kalori, harga acuan, serta ketentuan khusus batu bara.
Dokumen teknis	Assay, kadar, moisture, WMT/DMT, hasil pemurnian.	Kualitas/kalori, tonase, moisture, harga dan tujuan penjualan.

Kapan dibuat PDF batu bara terpisah?

Ketika pembaca memerlukan perhitungan tarif menurut izin/kontrak, kualitas dan harga batu bara; perlakuan IUPK kelanjutan; ketentuan pasar domestik; atau rangkaian ekspor batu bara. Kedalaman tersebut akan membuat panduan mineral terlalu bercabang.

Rancangan seri TouTax

Panduan pertanian/perikanan tetap berdiri sendiri. Panduan ini menjadi induk mineral prioritas Sulawesi. Batu bara dan panduan khusus smelter dapat dikembangkan sebagai edisi lanjutan dengan sumber serta contoh yang sesuai operasinya.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Batu bara sebagai pembanding

Periksa rezim tersendiri. Ilustrasi ini tidak mewakili lokasi tambang tertentu di Sulawesi.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[1] PP 49 Tahun 2022 · [3] PMK 51 Tahun 2025 · [6] PP 19 Tahun 2025 · [24] PP 15 Tahun 2022 · [25] PP 18 Tahun 2025

Rekonsiliasi dari barang ke kas

Gunakan satu nomor lot atau pengiriman yang dapat ditelusuri sampai buku besar.

Tahap	Pengujian bulanan
Produksi dan persediaan	Stok awal + produksi/pembelian – penjualan/pemakaian – kehilangan yang dijelaskan = stok akhir.
Penjualan	Tonase × harga sesuai satuan ± penyesuaian kadar/kualitas = nilai invoice final.
Pajak dan royalti	Cocokkan invoice, bukti pungut, faktur, dasar royalti, serta bukti pajak daerah tanpa memaksakan semua dasar sama.
Kas	Invoice – pungutan/potongan yang sah ± uang muka/koreksi = penerimaan atau saldo piutang.
Buku besar	Cocokkan pendapatan bruto, persediaan, biaya, utang pungutan, serta pajak dibayar di muka.

Jurnal penjual: contoh bijih Rp1 miliar pada halaman 25

Saat penerimaan; disederhanakan	Debit	Kredit
Bank	Rp985 juta	—
PPh 22 dibayar di muka	Rp15 juta	—
Penjualan	—	Rp1 miliar

Jika penjualan diakui lebih dahulu, catat piutang saat penyerahan sesuai kebijakan pengakuan, lalu lunasi piutang ketika kas dan bukti pungut diterima. Jurnal di atas menyederhanakan waktu untuk memperlihatkan pemisahan pendapatan dan kredit pajak; belum termasuk harga pokok, royalti, atau transaksi lain.

Selisih yang harus dijelaskan

Kadar basah/kering tertukar; hasil uji final berbeda; stok di pemurni tidak tercatat; pajak dipungut atas NPWP yang salah; royalty billing tidak cocok dengan lot; atau netting jasa mengurangi omzet tanpa dasar.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Satu pengiriman, satu jejak bukti

Telusuri stok, invoice, bukti pajak, serta penerimaan bank dengan nomor yang saling terhubung.

[3] PMK 51 Tahun 2025 · [4] PMK 61/PMK.03/2021

Tutup buku sebelum jatuh tempo

Kalender umum ini perlu ditambah tenggat PNPB, daerah, kepabeanan, dan ketentuan khusus perusahaan.

Kewajiban umum	Tenggat acuan
Setoran PPh masa yang mengikuti ketentuan umum PMK 81/2024	Umumnya tanggal 15 bulan berikutnya; termasuk jenis PPh masa yang relevan. Pungutan saat impor/ekspor atau skema khusus dapat berbeda.
SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh Unifikasi	Umumnya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pastikan jenis kewajiban dan bukti potong/pungutnya.
PPN kurang bayar dan SPT Masa PPN	Pembayaran sebelum pelaporan; pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya.
SPT Tahunan badan	Empat bulan setelah akhir tahun pajak; 30 April untuk tahun buku kalender, kecuali perpanjangan yang sah.
PPh kurang bayar tahunan	Dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan sesuai ketentuan.
Royalti, pajak daerah, DHE, dan ekspor	Masukkan tenggat menurut aturan dan peristiwa masing-masing; jangan menyalin tanggal 15 untuk semuanya.

Jadwal internal yang disarankan

Hari 1–5: tutup lot, timbang, stok, dan penjualan. **Hari 6–10:** rekonsiliasi bukti pajak, vendor, dan royalti. **Sebelum tanggal 15:** telaah dan bayar jenis PPh yang jatuh tempo. **Sebelum tanggal 20:** kirim SPT Masa PPh. **Sebelum akhir bulan:** selesaikan pengujian PPN dan pelaporan.

Tanggal internal merupakan rancangan kerja TouTax, bukan tambahan tenggat hukum. Periksa penyesuaian hari libur, perpanjangan resmi, perubahan aturan, dan notifikasi pada sistem. PMK 81/2024 telah mengalami perubahan, termasuk PMK 1/2026.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Tutup data sebelum tenggat

Sediakan waktu untuk memeriksa angka dan bukti sebelum pembayaran serta pelaporan.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

[22] PMK 81 Tahun 2024

Bangun berkas yang siap diperiksa

Mulai dari transaksi paling besar dan jenis pungutan yang berulang.

Minggu	Hasil yang harus tersedia	Penanggung jawab
1 — Profil usaha	Matriks izin, peran, lokasi, produk, pembeli, PKP, dan rezim fiskal; daftar ketentuan yang masih perlu dikonfirmasi.	Direktur, legal, pajak
2 — Transaksi	Pemetaan 10 transaksi utama: penjualan, alat, jasa, angkut, gaji, dan afiliasi; dasar/tarif serta bukti untuk masing-masing.	Keuangan, pengadaan
3 — Data fisik	Rekonsiliasi satu bulan produksi, stok, penjualan, assay, royalti, dan penerimaan. Jelaskan setiap selisih material.	Operasi, komersial, akuntansi
4 — Pelaporan	Kalender, akses petugas, proses telaah, bukti bayar/lapor, serta daftar tindak lanjut yang ditutup atau dieskalasi.	Pajak, treasury, direktur

Daftar berkas minimum

Perusahaan: akta, NPWP, PKP, izin, komoditas, dan RKAB terkini. **Penjualan:** kontrak, lot, timbang, assay, serah terima, invoice, serta bukti pungut. **Biaya:** kontrak vendor, faktur, bukti potong, aset, dan bukti pemakaian. **Pungutan:** perhitungan royalti, harga acuan, billing, pajak daerah, dan bukti pelaporan. **Ekspor:** HS, dokumen izin, PEB, bea keluar, penerimaan valas, dan register DHE.

Tiga persetujuan sebelum invoice pertama

Komersial menyetujui harga dan satuan. Operasi menyetujui tonase serta kualitas. Pajak/keuangan menyetujui pihak penjual, perlakuan PPN, pemungut PPh, dan dasar pungutan terkait.

Rencana dan daftar berkas pada halaman ini merupakan rekomendasi pengendalian yang disusun dari alur transaksi dalam panduan. Sesuaikan pembagian tugas dengan ukuran perusahaan.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Tim lapangan dan keuangan bekerja bersama

Operasi memastikan volume dan kadar. Keuangan menghubungkannya dengan transaksi.

Isi untuk setiap alur penjualan

Gunakan satu lembar untuk satu kombinasi produk, peran, dan lokasi. Tarif belum boleh diisi hanya berdasarkan nama komoditas.

Bidang keputusan	Isian / bukti yang dilampirkan
Perusahaan dan masa transaksi	Nama: _____ Masa: _____
Peran dan izin	Peran: _____ Izin: _____
Lokasi dan produk	Kabupaten/provinsi: _____ Produk/HS: _____
Proses dan karakter barang	Langsung dari sumber / olahan; kadar, moisture, dan sertifikat: _____
Pembeli dan hak atas barang	Status pemungut; pihak penerbit invoice; saat perpindahan hak: _____
PPN dan Pajak Masukan	Perlakuan: _____ Dasar hukum: _____ Bukti fasilitas / pengujian kredit: _____
PPh 22 atau jenis PPh lain	Pemungut: _____ Dasar dan tarif: _____ Pengecualian / bukti: _____
Royalti / PNBP	Pos lampiran resmi: _____ Periode harga: _____ Volume, dasar, tarif, serta billing: _____
MBLB / opsen / pajak lokasi	Perda dan keputusan harga: _____ Tarif: _____ Objek, dasar, tenggat, serta bukti: _____
Ekspor bila relevan	Izin/HS, PPh 22, bea keluar, PPN, dan skema DHE: _____
Telaah akhir	Disiapkan: _____ Ditelaah: _____ Tanggal dan hal yang belum selesai: _____

Apabila dasar atau syarat belum terkonfirmasi, beri status “belum ditetapkan” dan lampirkan pertanyaan yang spesifik. Hasil telaah harus bisa diulang oleh pemeriksa lain dari berkas yang sama.

DARI LAPANGAN KE PAJAK

Simpan alasan setiap keputusan

Isian yang lengkap membuat perlakuan pajak dapat ditelusuri dan diperiksa kembali.



Ilustrasi AI; konteks pertambangan, bukan dokumentasi lokasi tertentu.

Istilah yang sering dipakai

Baca istilah sesuai konteks peraturan dan kontrak. Daftar ini membantu memahami singkatan dalam panduan.

Istilah	Arti ringkas
IUP / IUPK / IPR	Izin Usaha Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan Khusus / Izin Pertambangan Rakyat. Rezimnya perlu diidentifikasi dari dokumen izin.
KK / PKP2B	Kontrak Karya / Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; ketentuan kontrak dapat relevan bagi kewajiban fiskal.
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kegiatan pertambangan. Gunakan persetujuan dan peraturan pelaksana terkini.
PNBP / royalti	Penerimaan Negara Bukan Pajak; royalti pertambangan merupakan salah satu jenis kewajiban yang perlu dibedakan dari pajak.
PPh / PPN / PKP	Pajak Penghasilan / Pajak Pertambahan Nilai / Pengusaha Kena Pajak. PKP adalah status administrasi pelaku, bukan nama tarif.
DPP / Pajak Masukan	Dasar Pengenaan Pajak / PPN atas perolehan yang pengkreditannya harus memenuhi syarat.
MBLB / opsen / PAB	Mineral Bukan Logam dan Batuan / pungutan tambahan persentase atas pajak tertentu / Pajak Alat Berat.
HMA / HPM	Harga Mineral Acuan / Harga Patokan Mineral; fungsi dan formula harus dibaca menurut komoditas dan periode.
WMT / DMT / assay	Ton metrik basah / ton metrik kering / pengujian kadar atau komposisi mineral.
Dore / bullion	Dore adalah produk emas yang belum sepenuhnya dimurnikan; istilah bullion tidak menggantikan syarat hukum emas batangan tertentu.
NPI / MHP	Nickel pig iron / mixed hydroxide precipitate: bentuk hasil pengolahan nikel yang berbeda dari bijih.
HS / PEB / DHE SDA	Klasifikasi barang Harmonized System / Pemberitahuan Ekspor Barang / Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Sumber dan rujukan 1

Nomor sumber dipakai kembali pada catatan halaman. Tautan judul dapat diklik; sumber ditelusuri hingga 16 September 2026.

[1] PP 49 Tahun 2022 — fasilitas PPN

Pasal 6, Pasal 25, ketentuan Pajak Masukan, dan penjelasan: barang tambang langsung dari sumber serta emas batangan. Naskah peraturan pada DJP.

[2] PMK 131 Tahun 2024 — penghitungan PPN

PPN 12% dan dasar pengenaan nilai lain 11/12 untuk penyerahan umum nonmewah; skema khusus perlu diperiksa tersendiri.

[3] PMK 51 Tahun 2025 — PPh Pasal 22

Naskah peraturan: Pasal 2–5, 8, dan 10. Pemungut, tarif, pengecualian, bukti pungut, dan sifat tidak final. Berlaku 1 Agustus 2025.

[4] PMK 61/PMK.03/2021 — pajak pemegang izin dan mitra

Khususnya Pasal 4–6: kerja sama, seluruh penghasilan hasil tambang pada pemegang izin, dan imbalan mitra.

[5] PP 37 Tahun 2018 — usaha pertambangan mineral

Kerangka perlakuan perpajakan/PNBP mineral dan rezim khusus. Halaman metadata ditelaah; ketentuan fiskal kontrak harus dibaca per perusahaan.

[6] PP 19 Tahun 2025 — jenis dan tarif PNBP ESDM

JDIH ESDM mencatat berlaku dan mencabut PP 26/2022. Lampiran angka tarif lengkap tidak berhasil diakses dalam riset ini; tidak direproduksi sebagai tabel tarif terverifikasi.

[7] Permen ESDM 9 Tahun 2025 — penghitungan dan pembayaran PNBP

Rujukan prosedur PNBP Minerba. Terapkan bersama lampiran tarif serta penetapan harga yang berlaku untuk periode transaksi.

[8] UU 1 Tahun 2022 — hubungan keuangan pusat dan daerah

Pasal 71–75 untuk MBLB dan Pasal 83 untuk opsen; ketentuan PAB dan pajak air. Naskah resmi DJPK.

[9] DJPK — Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah

Penjelasan pemerintah mengenai opsen MBLB dan mekanisme hubungannya dengan pajak kabupaten/kota.

[10] DJP — implementasi PP 20 Tahun 2026

Penjelasan resmi mengenai pembatasan subjek PPh final UMKM dan transisi. Digunakan sebagai penjelasan, bukan pengganti naskah peraturan.

Sumber dan rujukan 2

Nomor sumber dipakai kembali pada catatan halaman. Tautan judul dapat diklik; sumber ditelusuri hingga 16 September 2026.

[11] **DJP — PPh badan dan PP 20/2026**

Penjelasan DJP mengenai penghitungan berdasarkan laba dan fasilitas Pasal 31E. Artikel pegawai DJP; penerapan wajib dikaitkan dengan UU PPh.

[12] **PMK 72 Tahun 2023 — penyusutan dan amortisasi**

Klasifikasi, masa manfaat, dan pengakuan fiskal aset berwujud/tidak berwujud. Baca bersama ketentuan khusus pertambangan.

[13] **DJP — pemotongan PPh Pasal 23**

Digunakan terbatas untuk objek dan tarif jasa/sewa 2%. Informasi tenggat lama pada halaman ini tidak dipakai; kalender mengacu PMK 81/2024 beserta perubahan.

[14] **PMK 141/PMK.03/2015 — jenis jasa lain PPh 23**

Daftar jasa dan ketentuan jumlah bruto. Substansi pekerjaan dan dokumen penggantian biaya menentukan perlakuan.

[15] **PMK 48 Tahun 2023 — emas dan jasa terkait**

Kerangka khusus emas; dibaca bersama perubahan PMK 11/2025 dan PMK 52/2025. Tidak diterapkan otomatis pada semua produk tambang emas.

[16] **PMK 52 Tahun 2025 — perubahan aturan emas**

Pembaruan PPh/PPN emas; relevan untuk pabrikan, pedagang, konsumen akhir, dan transaksi sesuai definisi peraturan.

[17] **PMK 80 Tahun 2025 — bea keluar emas**

Naskah resmi termasuk Pasal 3, rumus Pasal 5, dan lampiran tarif. Tanggal berlaku dikonfirmasi melalui pengumuman Bea Cukai [18].

[18] **Bea Cukai Juanda — pemberlakuan PMK 80/2025**

Pengumuman 8 Januari 2026: bea keluar emas berlaku sejak 23 Desember 2025.

[19] **Bank Indonesia — PBI 5 Tahun 2026**

Perubahan kedua PBI 7/2023 mengenai DHE dan DPI. Ringkasan resmi 13 Juli 2026; mencakup penempatan dan instrumen DHE SDA.

[20] **Kementerian Keuangan — penguatan DHE SDA 2026**

Penjelasan PP 21/2026: penempatan melalui bank BUMN, konversi, penggunaan dana, dan pengaturan khusus Pasal 18A.

Sumber dan rujukan 3

Nomor sumber dipakai kembali pada catatan halaman. Tautan judul dapat diklik; sumber ditelusuri hingga 16 September 2026.

[21] Kemenko Perekonomian — pelaksanaan Pasal 18A

Pengumuman 29 Agustus 2026 teridentifikasi. Isi penuh tidak berhasil diakses; panduan tidak menyalin daftar negara/bank atau menetapkan kelayakan eksportir.

[22] PMK 81 Tahun 2024 — administrasi sistem inti perpajakan

Baca beserta perubahan, termasuk PMK 1 Tahun 2026. Dasar kalender pembayaran/pelaporan umum dalam panduan.

[23] PMK 172 Tahun 2023 — transaksi hubungan istimewa

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta dokumentasi transfer pricing sesuai syarat yang berlaku.

[24] PP 15 Tahun 2022 — perpajakan/PNBP batu bara

Kerangka fiskal batu bara. Dibaca bersama PP 18 Tahun 2025 dan rezim izin/kontrak masing-masing.

[25] PP 18 Tahun 2025 — perubahan fiskal batu bara

Perubahan PP 15/2022. Pembanding; bukan dasar tarif bagi nikel, emas, atau batuan.

[26] Kota Bitung — Perda 1 Tahun 2024 PDRD

Keberadaan dan status Perda pada JDIH terkonfirmasi; pasal tarif dan keputusan harga belum terverifikasi. Bukan tarif bagi seluruh Sulawesi.

[27] JDIH ESDM — pembaruan peraturan pelaksanaan

Katalog memuat Permen ESDM 6/2026 yang mengubah Permen 17/2025 tentang RKAB. Rujukan penelusuran versi; tidak mengasumsikan aturan RKAB 2025 tetap utuh.

[28] PMK 186/PMK.03/2019 — objek PBB

Klasifikasi objek PBB pusat; baca dengan perubahan PMK 234/PMK.03/2022 dan ketentuan penilaian yang relevan.

[29] PMK 62/PMK.03/2021 — biaya tertentu usaha mineral

Rujukan biaya pembangunan infrastruktur sosial dan sumbangan pada usaha mineral. Persyaratan dan bukti perlu diuji.

Pembukuan dan standar akuntansi

Sumber diperiksa untuk revisi isi 16 September 2026. Sumber perusahaan/asosiasi digunakan untuk fakta teknis, bukan ketentuan pajak.

[30] UU KUP - kewajiban pembukuan dan arsip

Pasal 28 ayat (1)-(2), (3)-(5), (7), dan (11); UU 6/1983 beserta perubahannya. Naskah perubahan Pasal 28 melalui UU 28/2007 pada DJP: kewajiban badan, isi buku, dan simpan dokumen 10 tahun.

[31] IAI - SAK Entitas Privat

Pengumuman 7 Desember 2023: lingkup pengguna SAK EP, 35 bab, serta efektivitas 1 Januari 2025 menggantikan SAK ETAP. Baca standar final untuk kebijakan transaksi.

[32] IAI - pengesahan PSAK 118

Pengumuman 18 Juni 2025: efektif 1 Januari 2027; menggantikan PSAK 201; kategori laporan laba rugi, subtotal, serta ukuran kinerja tetapan manajemen. Bukan pengganti seluruh SAK Indonesia.

[33] IAI - eksplorasi dan evaluasi pertambangan

Modul CA Pelaporan Korporat 2025, hlm. tercetak 140-141 dan halaman berikutnya: lingkup PSAK 106 serta pengakuan aset eksplorasi/evaluasi. Ikuti standar final dan kerangka yang dipilih.

[34] Badan Geologi - GeoRIMA dan neraca mineral

Sumber pemerintah untuk menelusuri jenis serta sebaran potensi mineral. Keberadaan mineral tidak sama dengan cadangan ekonomis, izin, atau status operasi suatu perusahaan.

Gunakan sumber sesuai fungsinya

Peraturan menentukan kewajiban. IAI menentukan standar akuntansi. Data geologi dan publikasi pelaku industri menjelaskan mineral serta proses. Kontrak dan bukti perusahaan menentukan penerapannya pada transaksi nyata.

Komoditas dan proses bisnis

Sumber diperiksa untuk revisi isi 16 September 2026. Sumber perusahaan/asosiasi digunakan untuk fakta teknis, bukan ketentuan pajak.

[35] Merdeka Gold Resources - profil Pani

Sumber perusahaan untuk lokasi Pani di Pohuwato, Gorontalo, serta kandungan emas dan perak. Digunakan untuk pengenalan komoditas, bukan penetapan cadangan independen atau dasar pajak.

[36] Bumi Resources Minerals - Gorontalo Minerals

Sumber perusahaan mengenai proyek tembaga-emas dan lokasi Bone Bolango. Diagram tembaga dalam panduan merupakan alur industri umum, bukan laporan operasi proyek tersebut.

[37] Vale - operasi dan proyek nikel Sulawesi

Sumber perusahaan mengenai Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa. Riwayat proyek HPAL/MHP dan kobalt: <https://vale.com/de/indonesia/our-history-in-indonesia>. Status/tanggal penyelesaian proyek tidak diproyeksikan dalam panduan.

[38] Harita Nickel - teknologi RKEF dan HPAL

Penjelasan teknis produsen: jalur saprolit-RKEF dan limonit-HPAL. Dipakai untuk istilah/alur umum; bukan klaim lokasi operasi Harita di Sulawesi.

[39] Copper Development Association - alur tembaga

Rujukan teknis asosiasi industri untuk flotasi, peleburan, dan pemurnian bijih sulfida. Dipakai hanya untuk diagram proses, bukan hukum pajak Indonesia.

Gunakan sumber sesuai fungsinya

Peraturan menentukan kewajiban. IAI menentukan standar akuntansi. Data geologi dan publikasi pelaku industri menjelaskan mineral serta proses. Kontrak dan bukti perusahaan menentukan penerapannya pada transaksi nyata.

Cara riset dan batas verifikasi

Panduan edukasi untuk menyiapkan keputusan transaksi; bukan penetapan pajak bagi satu perusahaan.

Dasar penyusunan

Riset mengutamakan naskah peraturan dan publikasi pemerintah: DJP, JDIH Kementerian Keuangan, ESDM, DJPK, Bank Indonesia, Bea Cukai, dan JDIH daerah. Peraturan dipisahkan dari artikel penjelasan. Sumber sekunder dipakai untuk mencari arah penelusuran, tidak sebagai dasar tabel tarif teknis dalam panduan.

Hal yang belum dapat dipastikan dalam edisi ini

Bagian	Batas yang harus diselesaikan sebelum penerapan
Royalti PP 19/2025	Lampiran tarif lengkap belum dapat diakses utuh. Seluruh angka royalti simulasi diberi label asumsi; verifikasi pos dan tarif resmi per pengiriman.
Tarif daerah Sulawesi	Tidak ada lokasi tambang spesifik. Tarif, harga standar, serta tenggat setiap kabupaten/provinsi belum dipastikan.
DHE Pasal 18A	Daftar rinci penerima, negara, bank, dan keputusan pelaksana tidak diverifikasi dari naskah penuh terbaru. Kelayakan harus dikonfirmasi.
KK / IUPK dan fasilitas khusus	Tidak ada kontrak, izin perusahaan, atau keputusan fasilitas yang diberikan. Perhitungan PPh contoh menggunakan rezim umum.

Tanggal penelaahan bukan jaminan semua perubahan telah terjangkau oleh akses sumber. Periksa kembali peraturan yang berlaku pada tanggal transaksi, terutama royalti, harga acuan, perdagangan ekspor, DHE, dan pajak daerah. Perhitungan pada panduan ini telah diperiksa secara aritmetis; penetapan perlakuan perusahaan memerlukan berkas aktual.